

# WAJIB PENGHILIRAN TUJUH PERUSAHAAN

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kembali wajib penghiliran bagi tujuh perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B), meski sejumlah kendala mengadangi.

Mochammad Ryan Hidayatullah, Afifah Rahmah Nurdifa, & Denis Riantiza Melianova  
redaksi@bisnis.com

**D**irektur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengatakan bahwa masalah penghiliran tujuh perusahaan tambang batu bara menjadi perhatian khusus.

"Ini masih mengalami beberapa kendala, masih ada diskusi yang perlu. Akan tetapi, ini sudah jadi atensin kami," kata Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (6/5).

Adapun ketujuh perusahaan tersebut, katanya, yakni PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, PT Tanito Harum, dan PT Berau Coal.

PT Arutmin Indonesia akan memproduksi produk hilir berupa metanol dan amonia dengan kapasitas input batu bara 6 juta ton per tahun dari Blok Sarongga. Salah satu perusahaan penghasil dan pengeksport batu bara terbesar ini berencana menginvestasikan US\$2,7 miliar. Sementara, untuk kapasitas output produk ditargetkan mencapai 2,95 juta ton per tahun.

Lalu, PT Kaltim Prima Coal akan memproduksi metanol dengan kapasitas input batu bara 6,5 juta ton per tahun. Nilai dari investasi proyek tersebut mencapai US\$2,1 miliar. Adapun kapasitas output produksi ditargetkan mencapai 1,8 juta ton per tahun.

PT Adaro Indonesia akan memproduksi metanol dan dimethyl ether (DME) dengan kapasitas input batu bara mencapai 6,75 juta ton per tahun dari Pit Wara 1 dan Pit Wara 2. Nilai investasi proyek tersebut masing-masing US\$2,61 miliar dan US\$2,83 miliar. Adapun kapasitas output-nya mencapai 2 juta ton per tahun untuk metanol dan 1,34 juta ton per tahun untuk DME.

Selanjutnya, PT Kideco Jaya Agung akan memproduksi amonia dan urea. Adapun kapasitas input batu bara mencapai 566.062

ton per tahun. Nilai investasi dari proyek ini mencapai US\$244,23 juta. Sementara, kapasitas output produksinya mencapai 100.000 ton untuk amonia per tahun dan 172.000 ton untuk urea per tahun.

Berikutnya, PT Multi Harapan Utama akan memproduksi semikokas dengan kapasitas input batu bara sebanyak 1 juta ton per tahun dari Pit Belumpur dan Pit South Sentuk, Blok Gitan. Nilai investasi dari proyek ini mencapai US\$81,3 juta. Adapun kapasitas output produk mencapai 552.000 ton per tahun untuk semikokas.

Sementara itu, PT Tanito Harum akan memproduksi semikokas dengan kapasitas input batu bara sebesar 300.000 ton per tahun dari Blok Sukodadi. Nilai investasi dari proyek ini mencapai US\$42,23 juta. Sementara kapasitas output produk mencapai 150.000 ton per tahun.

Lalu, PT Berau Coal akan memproduksi metanol dengan kapasitas input batu bara 3,49 juta ton per tahun dari Blok Bunnungan 10. Adapun nilai investasi proyek ini mencapai US\$774,8 juta. Sementara kapasitas output produk mencapai 940.000 ton per tahun.

Ketentuan wajib penghiliran batu bara diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian mengalami perubahan melalui UU Nomor 3 Tahun 2020. Ketentuan lebih rinci penghiliran batu bara diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya memastikan bahwa pemerintah terus mengupayakan

proyek penghiliran batu bara, meski progresnya nyaris sejak beberapa tahun terakhir.

Penghiliran, kata Bahlil, wajib dilakukan oleh Perusahaan eks- PKP2B yang mendapatkan perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Meski demikian, produk akhir penghiliran batu bara itu tidak harus berupa DME yang digadag-gadag menjadi pengganti *liquefied petroleum gas* (LPG).

Akan tetapi, sejumlah perusahaan menghadapi sejumlah kendala. Misalnya, PT Arutmin Indonesia menghadapi kendala berupa erosi pada lahan yang sudah direklamasi pascapenambangan. Kendala lainnya terkait masa berlaku kontrak izin tambang yang bisa berdampak pada kelanjutan produksi.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyortir masalah keekonomian dalam pengembangan proyek penghiliran batu bara menjadi DME.

Pt Direktur Eksekutif APBI, Gita Mahyarani mengatakan, proyek DME memerlukan belanja modal besar yang mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari konversi batu bara menjadi *syngas*. Kemudian, menjadi produk turunan seperti amonia, urea, metanol, hingga DME yang harus dipikirkan sebagai seluruh proses.

Menurut Gita, biaya investasi itu bahkan melampaui nilai pembangunan tambang. "Dalam banyak kasus, besaran investasi ini bahkan bisa melampaui nilai pembangunan tambang batu bara konvensional," kata Gita kepada *Bisnis*, Selasa (6/5).

Meski demikian, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) menyebut perusahaan asal China, ECEC berminat menjadi investor menggantikan Air Product & Chemical Inc.

Merujuk paparan PTBA, ECEC yang telah menyampaikan *preliminary proposal coal to DME* pada November 2024 itu, mengusulkan *processing service fee* (PSF) indikatif senilai US\$412 hingga US\$488 per ton. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan eks-



**Ini masih mengalami beberapa kendala, masih ada diskusi yang perlu. Akan tetapi, ini sudah jadi atensin kami.**

pektasi Kementerian ESMD, yakni senilai US\$310 per ton.

Di sisi lain, harga DME yang dapat dihasilkan yakni senilai US\$911—US\$987 per ton. Angka ini juga lebih tinggi patokan DME yang diusulkan oleh Kementerian ESMD pada 2021 yakni US\$617 per ton, belum termasuk subsidi.

Di samping penajakan yang masih berlanjut, PTBA masih terus mempersiapkan proyek DME ini secara paralel. Hingga saat ini, PTBA telah berhasil melakukan pembebasan lahan seluas 198 hektare atau sekitar 97% dari total kebutuhan lahan sebesar 203 hektare.

"Itu merupakan komitmen dari kesiapan kami dalam menjalankan proyek ini. *Nah*, kami juga terus menjalin tentunya koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Satgas Hilirisasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perindustrian, dan lembaga terkait lainnya untuk memproyeksi arahan dan dukungan kebijakan yang kami butuhkan," tutur Direktur Utama PTBA Arsal Ismail, Senin (5/5). □

**Kendala Utama penghiliran perusahaan tambang di antaranya terkait erosi pada lahan yang sudah direklamasi pascapenambangan. Selain itu, ada juga kendala terkait masa berlaku kontrak izin tambang.**



Harga Batu Bara Acuan (HBA) 1 Tahun Terakhir hingga Periode Pertama Mei 2025



Kementerian ESMD telah menyetujui proyek hilirisasi batu bara lima perusahaan yang masa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) sudah habis.



## Ekspor Batu Bara Indonesia (Ton)

Sumber: Trademap, 2024



## Rencana Penghiliran 7 Perusahaan Tambang

Pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap rencana penghiliran 7 raksasa perusahaan tambang.

Perusahaan	Produk	Investasi (Miliar US\$)
PT Arutmin Indonesia	metanol dan amonia	US\$2,7 miliar
PT Kaltim Prima Coal	metanol	US\$2,1 miliar
PT Adaro Indonesia	methanol, DME	US\$5,44 miliar
PT Kideco Jaya Agung	amonia dan urea	US\$244,23 juta
PT Multi Harapan Utama	semikokas	US\$81,3 juta
PT Tanito Harum	semikokas	US\$42,23 juta
PT Berau Coal	methanol	US\$74,8 juta

Sumber: Bisnis, 2025

BISNIS/SINTA NOVIZAN